

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disparitas pendapatan secara konseptual merupakan kondisi ketidakmerataan distribusi hasil pembangunan di antara anggota masyarakat dalam suatu wilayah. Disparitas pendapatan bukan sekedar fenomena perbedaan angka pendapatan antar masyarakat saja, melainkan cerminan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi (Perdana & Yasin, 2025).

Para ahli ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo dan Thomas Malthus secara umum memandang disparitas pendapatan sebagai konsekuensi alami dari proses awal pembangunan ekonomi. Menurut Adam Smith melalui konsep *invisible hand* menjelaskan disparitas bisa muncul sebagai hasil dari pembagian kerja yang bertujuan meningkatkan produktivitas dan adanya kekuatan pasar yang hanya terkonsentrasi pada beberapa pihak akan berdampak munculnya ketimpangan di masyarakat. Sementara, David Ricardo disparitas terjadi sebagai hasil dari perbedaan penguasaan faktor produksi seperti tanah, modal dan tenaga kerja. Thomas Malthus juga memandang disparitas sebagai fenomena yang sulit dihindari karena adanya tekanan populasi terhadap sarana penghidupan yang terbatas (Taufiq et al., 2025).

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah diuraikan, disparitas pendapatan merupakan kondisi ketidakseimbangan atau kesenjangan yang terjadi secara nyata dalam distribusi pendapatan di suatu wilayah pada periode

tertentu. Kondisi ini bisa terjadi akibat perbedaan faktor produksi dan adanya kekuatan pasar yang menguntungkan salah satu pihak saja. Secara global, tantangan disparitas pendapatan masih sering dihadapi, meskipun kemajuan teknologi dan globalisasi berhasil mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan ekstrem. Menurut data dari *World Inequality Database* tahun 2021 menunjukkan sekitar 10 persen penduduk dunia paling kaya memiliki kekayaan 76% dari seluruh kekayaan di dunia. Sedangkan, hampir setengah penduduk paling miskin bahkan hanya memiliki 2% dari kekayaan total di dunia (World Inequality Database, 2022).

Dalam melihat fenomena disparitas pendapatan yang terjadi sering kali menggunakan tolak ukur berupa indeks gini yang dihitung berdasarkan kurva lorenz dengan rentang nilai 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka distribusi pendapatan di suatu wilayah menunjukkan rendahnya keadilan ekonomi (Al Barabasi & Atmanti, 2025). Menurut Oshima kriteria indeks gini yang tinggi yaitu ketika nilainya lebih dari 0,5 dan semakin rendah jika nilainya kurang dari 0,4 atau semakin mendekati 0. Sedangkan, nilai yang berada antara 0,4 hingga 0,5 dianggap ketimpangan atau disparitas sedang (Rahmadana, 2022).



Gambar 1. 1 Grafik Indeks Gini di Pulau Jawa

Gambar 1.1 menggambarkan fenomena disparitas pendapatan yang terjadi di Indonesia terutama saat pandemi COVID-19 memicu lonjakan hingga masa pemulihan ekonomi tahun 2023. Dilihat dari angka rasio gini nasional sebagai gambaran tingkat disparitas pendapatan mencapai 0,383 pada 2020 dan bertahan hingga 0,3825 pada 2021. Kondisi disparitas paling kritis terjadi di tahun 2023 dengan indeks gini menyentuh angka 0,388 (BPS, 2023). Angka tersebut menunjukkan distribusi pendapatan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat masih memiliki jurang yang cukup mengkhawatirkan.



Gambar 1. 2 Grafik Indeks Gini Tertinggi di Indonesia 2023

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa provinsi dengan indeks gini tertinggi di Indonesia tahun 2023 didominasi oleh wilayah di Pulau Jawa, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, sedangkan dua provinsi lainnya berasal dari luar Jawa. Fakta ini memperlihatkan bahwa Pulau Jawa yang dikenal sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, industri, dan aktivitas ekonomi nasional justru memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif tinggi. Kepadatan aktivitas ekonomi, arus urbanisasi, dan konsentrasi

kesempatan kerja pada sektor tertentu menyebabkan manfaat pertumbuhan belum dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alasan kuat penelitian ini memfokuskan kajian pada Pulau Jawa sebagai wilayah yang paling relevan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi disparitas pendapatan.

Disparitas pendapatan di Pulau Jawa masih tergolong sedang meskipun wilayah ini merupakan pusat perekonomian, industri, dan investasi nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan kesejahteraan, sehingga kesenjangan pendapatan antarwilayah masih menjadi persoalan yang cukup kompleks, sebagaimana terlihat dari data Indeks Gini BPS tahun 2017-2023.



Gambar 1. 3 Grafik Disparitas Pendapatan

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas, indeks gini di wilayah Pulau Jawa menunjukkan bahwa distribusi pendapatan antar wilayah belum sepenuhnya

merata. Di Yogyakarta secara konsisten mencatat indeks gini tertinggi di Pulau Jawa sebesar 0,449 yang menunjukkan Yogyakarta memiliki kategori disparitas sedang. Sementara itu, DKI Jakarta dan Jawa Barat menyusul dengan angka indeks gini berada di kisaran 0,39 hingga 0,43. Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten cenderung memiliki angka yang lebih rendah yaitu di kisaran 0,36 hingga 0,40, namun ketiga wilayah ini tetap mengalami fluktuasi yang tidak menentu.

Beberapa faktor kunci yang diduga menjadi determinan dalam dinamika disparitas ini meliputi kualitas modal manusia, ketersediaan lapangan kerja, serta kebijakan investasi dan pengupahan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan ringkasan capaian rata-rata dalam dimensi utama pembangunan manusia. IPM bukan hanya mengukur pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan bahwa manusia dan kemampuannya menjadi salah satu penilaian pembangunan suatu negara. Dimensi IPM meliputi angka harapan hidup, pendidikan dan standar hidup layak. Menurut penelitian Heni Meidiyan et al. (2025) semakin tinggi kualitas manusia, semakin rendah ketimpangan pendapatannya. Adanya peningkatan IPM dapat meningkatkan produktivitas masyarakat karena kualitas manusia yang meningkat memungkinkan individu untuk bekerja secara efisien dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini berdampak baik untuk menurunkan kemiskinan, sehingga dapat memperkecil ketimpangan di masyarakat. Berikut ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa tahun 2017 - 2023:



Gambar 1. 4 Grafik Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas, kualitas pembangunan manusia di Pulau Jawa selama periode 2017 hingga 2023 menunjukkan tren positif. Meskipun, sempat diterjang pandemi COVID-19 pada pertengahan periode, namun angka IPM di seluruh provinsi tetap naik. Hal ini menunjukkan adanya ketahanan struktur pendidikan dan kesehatan di wilayah ini. DKI Jakarta masih menempati posisi puncak dengan skor IPM yang sangat impresif, secara konsisten termasuk kategori sangat tinggi dan berada di atas 80. Sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, akses terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan yang tinggi bisa menjadi faktor utama kenaikan angka ini. DI Yogyakarta memberikan kontribusi yang besar sebagai Kota Pendidikan berada di posisi kedua dengan pergerakan angka di kisaran 78 hingga 81. Sementara, provinsi lainnya berada di pergerakan angka 70 hingga 75. Semakin besar IPM akan menurunkan nilai disparitas pendapatan di suatu wilayah. Hal ini sejalan dengan penelitian

Ghifara et al., 2022) yang menegaskan peningkatan indeks pembangunan manusia dapat dianalisis sebagai faktor yang menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Pengaruh IPM terhadap disparitas pendapatan dapat dilihat dari perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi faktor penting dalam proses pembangunan ekonomi. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, kondisi kesehatan yang memadai, serta standar hidup yang layak cenderung memiliki peluang kerja yang lebih luas dan produktivitas yang lebih tinggi sehingga mampu memperoleh pendapatan yang lebih baik. Kondisi tersebut dapat mendorong pemerataan kesempatan ekonomi di masyarakat dan pada akhirnya berpotensi menurunkan tingkat disparitas pendapatan antar wilayah (Yoertiara & Feriyanto, 2022). Oleh karena itu, IPM dipilih sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini karena indikator ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia. IPM digunakan sebagai indikator utama untuk menilai kualitas sumber daya manusia serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup yang layak (Bina & Putra, 2025).

Pembahasan determinan disparitas pendapatan tidak hanya berkaitan dengan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam IPM, tetapi juga faktor demografis seperti jumlah dan persebaran penduduk. Kepadatan penduduk menjadi variabel yang relevan karena konsentrasi penduduk yang tinggi dapat memengaruhi kesempatan kerja dan distribusi pendapatan. Pulau Jawa merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi di Indonesia, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik, wilayah ini menampung lebih dari

55,58 persen total populasi nasional pada tahun 2023. Kepadatan penduduk yang tinggi bisa menyebabkan peningkatan biaya logistik dan tekanan pada lahan. Secara jangka panjang, kondisi ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi wilayah dan menyebabkan masyarakat lokal terpinggirkan ke pinggiran kota yang dapat memicu kenaikan ketimpangan aset atau kekayaan (Miladiah & Rahmayani, 2025). Grafik di bawah ini menunjukkan kepadatan provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2017 – 2023:



Gambar 1. 5 Grafik Kepadatan Penduduk

Berdasarkan Gambar 1.5, DKI Jakarta menunjukkan perbedaan tingkat kepadatan yang sangat signifikan dibandingkan lima provinsi lainnya. Dengan angka yang menembus 16.000 jiwa per km², Jakarta bukan lagi sekadar wilayah padat, melainkan menciptakan jurang yang sangat lebar jika dibandingkan dengan Jawa Timur, yang secara administratif memiliki wilayah terluas di Jawa namun hanya memiliki kepadatan di kisaran 800-an jiwa per km² (BPS, 2024).

Perbedaan yang mencapai lebih dari sepuluh kali lipat ini menunjukkan bahwa beban pembangunan dan konsentrasi manusia masih tertumpu secara masif di jantung ibu kota.

Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di DKI Jakarta juga membuka peluang terbentuknya permintaan domestik yang besar, sehingga sektor UMKM dan informal berpotensi berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Azzahra & Rahman, 2025). Selain itu, perusahaan lebih mudah mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dan pekerja dapat lebih mudah menemukan lapangan kerja. Namun, kepadatan penduduk di Pulau Jawa yang cenderung terpusat di DKI Jakarta justru menimbulkan permasalahan berupa meningkatnya ketimpangan pendapatan, karena besarnya jumlah penduduk tidak selalu diiringi dengan ketersediaan kesempatan kerja yang memadai. Persaingan yang semakin tinggi jika tidak diimbangi dengan kualitas manusia hanya akan membuat jurang ketimpangan semakin besar (Al Barabasi & Atmanti, 2025).

Pengaruh kepadatan penduduk terhadap disparitas pendapatan dapat dilihat dari konsentrasi penduduk yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja di suatu wilayah (Putri, 2023). Di satu sisi, konsentrasi penduduk yang tinggi dapat mendorong aktivitas ekonomi karena tersedianya tenaga kerja yang melimpah dan pasar yang besar. Namun, apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai, maka persaingan dalam memperoleh pekerjaan akan semakin tinggi sehingga sebagian masyarakat bekerja pada sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Oleh karena itu, kepadatan

penduduk dipilih sebagai variabel dalam penelitian ini karena Pulau Jawa memiliki konsentrasi penduduk terbesar di Indonesia yang diduga memengaruhi tingkat disparitas pendapatan.

Menurut Mulyani & Sakti (2022), kepadatan penduduk juga merupakan variabel strategis yang secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dinamika kepadatan penduduk yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di wilayah metropolitan seperti DKI Jakarta, tidak hanya menciptakan ekosistem bagi sektor informal, tetapi juga secara magnetis menarik perhatian para pemilik modal. Dalam teori ekonomi regional, wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi sering kali dipandang sebagai pasar potensial sekaligus penyedia tenaga kerja yang melimpah. Hal inilah yang mendasari mengapa arus investasi terus mengalir deras ke Pulau Jawa dibandingkan pulau-pulau lainnya di Indonesia.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) membawa dampak terhadap distribusi pendapatan jika dibandingkan pengaruh kepadatan penduduk. Namun, realitas menunjukkan bahwa pemerintah mengarahkan investasi modal ke sektor-sektor prioritas seperti manufaktur, energi, dan teknologi (Ma'rifah & Rifqi, 2025). Hal inilah yang mendorong banyaknya penanaman modal pada wilayah yang dinilai lebih sesuai seperti di DKI Jakarta. Berikut ini data modal dalam negeri di Pulau Jawa tahun 2017 – 2023 :



Gambar 1. 6 Grafik Modal Dalam Negeri

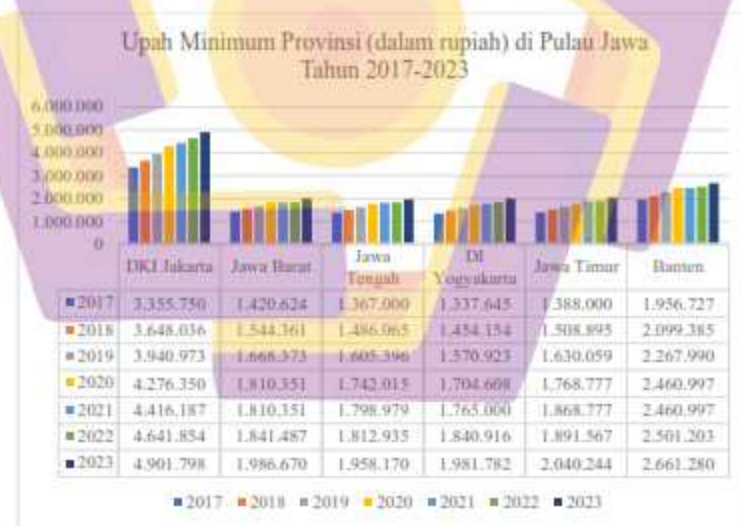
Berdasarkan Gambar 1.6, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur secara konsisten menduduki posisi teratas dalam penyerapan modal domestik. Jakarta, sebagai pusat finansial terbukti pada tahun 2022 mengalami peningkatan tajam. Sementara itu, Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi primadona bagi investor manufaktur karena dukungan infrastruktur yang memadai, salah satunya pembangunan Pelabuhan Patimban yang dirancang sebagai pusat logistik utama industri otomotif untuk menekan biaya ekspor ke pasar global sekaligus menarik minat investor (Muhammad et al., 2025). Namun, di sisi lain, DI Yogyakarta menempati posisi paling akhir dalam realisasi modal dalam negeri dibandingkan provinsi lainnya di Jawa. Hal ini karena DI Yogyakarta lebih fokus pada sektor pariwisata, pendidikan dan ekonomi kreatif yang tidak bertumpu langsung pada industri manufaktur besar sebagai penggerak utama ekonomi di suatu wilayah saat ini. Selain itu, secara geografis dan administratif,

DI Yogyakarta memiliki wilayah yang relatif lebih kecil dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, sehingga ruang untuk pengembangan industri berskala besar menjadi terbatas. Keterbatasan tersebut, ditambah dengan belum berkembangnya kawasan industri dan infrastruktur skala besar, turut memengaruhi rendahnya daya tarik investasi dibandingkan provinsi seperti Jawa Barat dan Jawa Timur yang telah didukung oleh kawasan industri terpadu.

Pengaruh modal dalam negeri terhadap disparitas pendapatan dapat dilihat dari perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja di suatu wilayah. Peningkatan investasi domestik dapat membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat (Mauliarumpaka & Zaimuri, 2023). Namun, apabila penanaman modal lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu, maka manfaat ekonomi yang dihasilkan juga cenderung tidak merata dan dapat memicu perbedaan tingkat pendapatan antarwilayah. Oleh karena itu, modal dalam negeri dipilih sebagai variabel dalam penelitian ini karena Pulau Jawa menjadi pusat utama penyerapan investasi domestik di Indonesia yang diduga memengaruhi tingkat disparitas pendapatan.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya juga menunjukkan penanaman modal yang besar akan berpotensi meningkatkan ketimpangan karena lebih banyak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Di Pulau Jawa khususnya penelitian oleh Rifaldo & Rejekiningsih (2024) menunjukkan pengaruh yang signifikan secara positif, artinya setiap adanya penanaman modal yang besar berdampak pada peningkatan disparitas pendapatan.

Investasi yang masuk ke suatu wilayah turut memengaruhi permintaan tenaga kerja dan struktur pengupahan. Dalam konteks tersebut, Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi instrumen regulasi yang ditetapkan pemerintah sebagai jaring pengaman (*social safety net*) untuk melindungi daya beli pekerja dan menjamin standar hidup yang layak (Alamsyah et al., 2025). Namun, dalam konteks Pulau Jawa periode 2017-2023, kebijakan ini memunculkan fenomena yang kontradiktif. Menurut penelitian Wulandari et al. (2025), UMP menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap Indeks Gini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan UMP justru cenderung memperlebar jurang ketimpangan pendapatan di tengah masyarakat. Berikut ini data Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Jawa tahun 2017 – 2023:



Gambar 1. 7 Grafik Upah Minimum Provinsi

Berdasarkan Gambar 1.7, DKI Jakarta selalu menempati posisi puncak sebagai provinsi dengan UMP tinggi, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga di tingkat nasional. Pada tahun 2023, UMP Jakarta telah menyentuh angka Rp4.901.798, yang menunjukkan lompatan signifikan dibandingkan tahun 2021 yang masih berada di angka Rp4.416.187. Kesenjangan antara UMP DKI Jakarta dengan provinsi lain di Jawa sangat lebar. UMP di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta masih berada di kisaran Rp1,3 juta hingga Rp1,9 juta pada tahun 2023. Artinya, upah minimum di Jakarta mencapai lebih dari 2,5 kali lipat dibandingkan upah di Jawa Tengah.

Tingginya UMP di DKI Jakarta tidak terlepas dari karakteristik struktur perekonomiannya. Sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi nasional, DKI Jakarta didominasi oleh sektor jasa modern, keuangan, perdagangan, serta perusahaan berskala besar yang memiliki kemampuan membayar upah relatif lebih tinggi. Selain itu, besaran upah minimum turut dipengaruhi oleh Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu ukuran biaya minimum yang diperlukan pekerja beserta keluarganya untuk memenuhi kebutuhan dasar (Simanjuntak & Yefriza, 2024). Produktivitas tenaga kerja dan nilai tambah ekonomi yang relatif lebih besar di wilayah ini juga menjadi faktor yang mendorong penetapan standar upah minimum pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini menciptakan daya tarik migrasi yang luar biasa besar menuju ibu kota, yang kemudian berujung pada ledakan kepadatan penduduk.

Pengaruh UMP terhadap disparitas pendapatan dapat dilihat dari perannya dalam menentukan standar upah minimum bagi pekerja di suatu wilayah.

Kenaikan UMP ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menekan tingkat kemiskinan (Prasetyo et al., 2025). Namun, apabila kenaikan upah hanya dirasakan oleh pekerja di sektor formal sementara sebagian masyarakat masih bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang lebih rendah, maka kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, UMP dipilih sebagai variabel dalam penelitian ini karena terdapat perbedaan tingkat upah minimum yang cukup besar antar provinsi di Pulau Jawa, seperti antara DKI Jakarta dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, sehingga diduga memengaruhi tingkat disparitas pendapatan antarwilayah.

Penelitian sebelumnya Wulandari et al. (2025) mengemukakan adanya paradoks investasi di Pulau Jawa, di mana peningkatan realisasi PMDN justru menjadi pemicu melebarnya disparitas akibat karakter investasi yang padat modal. Penelitian serupa dari Putri & Hanifa, (2024) menunjukkan bahwa kebijakan UMP berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan karena kenaikan upah minimum lebih banyak dirasakan oleh pekerja sektor formal di perkotaan, sedangkan pekerja sektor informal di pedesaan tidak memperoleh manfaat yang sebanding.

Secara garis besar, disparitas pendapatan di Pulau Jawa periode 2017-2023 bisa dipengaruhi lebih banyak oleh realisasi modal dalam negeri yang bersifat padat modal serta Upah Minimum Provinsi (UMP). Kedua variabel ini memungkinkan dapat memperlebar jurang ketimpangan yang terjadi di Pulau Jawa, karena ini berpotensi hanya meningkatkan taraf segelintir kelompok

pekerja di sektor formal saja, sedangkan masyarakat di lapisan bawah tetap terjebak dalam struktur ekonomi yang marginal (Miladiah & Rahmayani, 2025).

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menekan disparitas pendapatan karena semakin tinggi akses seseorang terhadap pendidikan, semakin besar pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, sehingga produktivitas meningkat dan berujung pada pendapatan yang lebih tinggi (Yoertiara & Feriyanto, 2022). Jumlah penduduk yang besar dan didukung kualitas memadai dapat mendorong aktivitas ekonomi serta mengurangi ketimpangan pendapatan (Putri, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kontradiksi yang nyata dalam dinamika pembangunan di Pulau Jawa pada variabel-variabel indeks pembangunan manusia, kepadatan penduduk, penanaman modal dalam negeri dan kebijakan upah yang bisa berpengaruh pada disparitas pendapatan. Peneliti ingin meneliti efektivitas IPM, kepadatan penduduk, modal dalam negeri dan upah minimum dalam menekan disparitas pendapatan di Pulau Jawa yang secara struktural merupakan pusat aglomerasi ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi pemerataan pendapatan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan agar dapat menganalisis sejauh mana variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap disparitas pendapatan dan juga mengidentifikasi faktor mana yang paling dominan dalam memicu ketimpangan pendapatan yang terjadi.

1.2 Rumusan Masalah

Disparitas pendapatan di Pulau Jawa tergolong sedang meskipun wilayah ini merupakan pusat perekonomian nasional dan menjadi episentrum aktivitas industri, perdagangan, serta investasi. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingginya kepadatan penduduk yang seharusnya mendorong produktivitas belum sepenuhnya mampu menekan ketimpangan, sementara realisasi modal dalam negeri yang cenderung padat modal serta kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) diduga turut memengaruhi dinamika distribusi pendapatan. Dengan kerangka ini, rumusan masalah dalam penelitian ini dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh kepadatan penduduk (KPD) terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa?
3. Bagaimana pengaruh modal dalam negeri (MDN) terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa?
4. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa.
2. Menganalisis pengaruh kepadatan penduduk (KPD) terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa.
3. Menganalisis pengaruh modal dalam negeri (MDN) terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa.
4. Menganalisis pengaruh upah minimum provinsi (UMP) terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan, khususnya mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kepadatan Penduduk (KPD), Modal Dalam Negeri (MDN), dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap disparitas pendapatan di Pulau Jawa.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat mengasah kemampuan analisis peneliti dalam memahami serta menjelaskan permasalahan ketimpangan atau disparitas pendapatan antarwilayah dengan menggunakan pendekatan ekonomi makro dan analisis data panel.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kontribusi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik

disparitas pendapatan maupun faktor-faktor yang memengaruhinya, khususnya di tingkat regional.

- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam upaya mengurangi disparitas pendapatan dan meningkatkan pemerataan pembangunan di Pulau Jawa.

1.5 Sistematika Bab

Sistematika penulisan disusun dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta mengkaji penelitian ini secara terstruktur. Penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang menyajikan gambaran umum mengenai penelitian serta permasalahan yang menjadi fokus pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memberikan pemahaman awal kepada pembaca mengenai arah dan tujuan penelitian. Adapun pembahasan dalam bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan pustaka yang menjelaskan landasan teori berupa definisi serta teori yang berkaitan dengan hubungan antar variabel penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan hasil penelitian terdahulu dan pada bagian

akhir disajikan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian yang merupakan dugaan sementara mengenai hubungan antar variabel yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode penelitian yang digunakan beserta alasan pemilihannya. Pembahasan meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, serta penentuan populasi dan sampel sebagai objek kajian. Selain itu, bab ini juga menguraikan metode pengumpulan data, definisi konsep dan variabel penelitian, serta teknik analisis data yang diterapkan untuk mengolah dan menganalisis data guna menjawab tujuan penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil analisis data yang telah dilakukan secara sistematis, jelas, dan terperinci. Pada bagian pembahasan dilakukan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh dengan mengaitkannya pada teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Pembahasan ini mencakup analisis mendalam terhadap temuan yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan harapan, serta faktor-faktor yang memengaruhi hasil penelitian, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap implikasi temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bagian ini menyajikan rangkuman temuan-temuan utama yang secara langsung menjawab rumusan masalah, disertai bukti-bukti yang diperoleh dari analisis dan pembahasan penelitian. Selain itu, bagian saran diberikan sebagai rekomendasi untuk penelitian berikutnya atau sebagai solusi yang dapat memberikan manfaat bagi pihak lain, termasuk para pembaca.